

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN INVESTASI NASIONAL

M. Rizal Taufikurahman⁽¹⁾, Dudi Setiadi Hendrawan⁽²⁾

⁽¹⁾Program Studi Agribisnis Universitas Trilogi, Jakarta

⁽²⁾Rokhmin Dahuri Institut, Bogor

⁽¹⁾korespondensi telepon: 081310209021

⁽¹⁾korespondensi email: mrizalt@trilogi.ac.id

ABSTRACT

Maritime development effort can not be separated from the development of strategic environments that include the supporting economic environment both on a regional scale, national, even at the global level. The aim of this study are (1) mapping out the opportunities and threats of the maritime sector in Indonesia based on the dynamics of the domestic and global environment, and (2) to formulate the maritime development policy strategy within the framework of national investment development. The method used is SWOT analysis. The results of the study indicate that opportunities that can be utilized for the benefit of domestic development can be seen from the potential of marine in the territory of Indonesia. The threat of the maritime sector comes from internal and external. The internal factors of inequality and disparity gap of development. The external factors threats are border disputes and lack of law enforcement, defense and security controls in border areas. The recommended policy suggested that government needs to do maritime-oriented development, connectivity through strengthening logistics and marine economy, economic development about prosperity approach and security, controlling related with the nation's authority and maritime, and reorientation of development towards maritime development with the achievement of planting more progressive capital.

Keywords: Policy strategy, maritime development, SWOT analysis, investment improvement

PENDAHULUAN

Upaya dalam pembangunan kemaritiman tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan perekonomian penunjangnya baik dalam skala regional, nasional, bahkan di tingkat global. Fokus pemerintahan saat ini yang ingin membangun sektor kemaritiman membutuhkan analisa dinamika lingkungan strategis yang memadai. Hal ini penting karena jika pembangunan kemaritiman tidak dipetakan secara baik berdasarkan posisinya di lingkungan yang dihadapi maka pembangunan tersebut akan semu dan salah arah. Oleh karena itu, perlu diwujudkan melalui pembangunan kemaritiman yang berbasis pada peningkatan investasi.

Negara Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi poros maritim dunia, namun sepertinya potensi tersebut sampai saat ini belum dikembangkan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan pembangunan kemaritiman belum dilakukan secara terintegrasi dengan lingkungan-lingkungannya yang strategis. Oleh karena itu, pembangunan kemaritiman yang terintegrasi perlu dilakukan untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan potensi maritim yang ada seperti transportasi laut (*sea transportation*), industri galangan kapal dan perawatannya (*ship building and maintenance*), pembangunan dan pengoperasian pelabuhan (*port construction and operation*).

Secara teoritis lingkungan strategis terbagi ke dalam beberapa bagian yang saling terintegrasi yaitu ketahanan nasional dimana menyangkut visi, misi, program utama dan sebagainya. Aspek lingkungan domestik atau dalam negeri, lingkungan luar negeri, dan lingkungan militer atau pertahanan negara. Jika dikaitkan dengan pengembangan kemaritiman saat ini pembangunan sektor maritim sudah menjadi agenda pada bagian pertama (ketahanan nasional) namun belum mendapatkan perhatian bagi tiga bagian lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pembangunan kemaritiman perlu menyusun lingkungan strategis yang terintegrasi antar bagiannya. Selain itu, perlu juga memperhatikan dinamika yang terjadi dalam bagian lingkungan domestik dan luar negeri. Oleh karena itu, urgensi dari ketahanan kemaritiman, maka perlu menyusun strategi kebijakan pembangunan kemaritiman dalam kerangka peningkatan investasi nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah (1) memetakan peluang dan ancaman sektor maritim di Indonesia berdasarkan dinamika lingkungan domestik dan global dan (2) memformulasi strategi kebijakan pembangunan kemaritiman dalam kerangka pembangunan investasi nasional.

BAHAN DAN METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari instansi terkait yang mempunyai legitimasi. Instansi-instansi tersebut adalah Bappenas/Kementerian PPN, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Pusat Statistika, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Bank Indonesia, dan institusi lainnya yang mempunyai legitimasi. Adapun data-data yang diperlukan adalah beberapa literatur mengenai kebijakan baik sektoral maupun nasional dan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) terbaru dan literatur lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

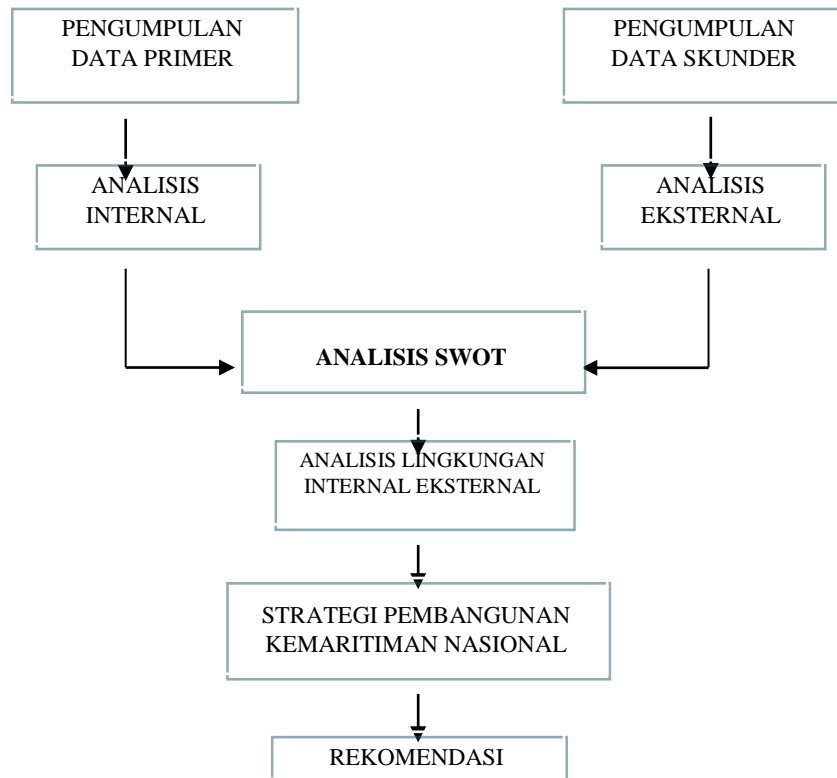
Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah melalui *desk study* dan survey instansional ke beberapa instansi terkait. Selain itu, dilakukan wawancara untuk melakukan pendalaman substansi dan konten. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan valid yang diperoleh melalui diskusi/survey kepada beberapa tenaga ahli dan para praktisi bidang kemaritiman sehingga dapat mempertajam analisis dan pendalaman kajian.

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam kajian ini dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis tersebut merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu permasalahan yang strategis berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu *Strengths, Weakness, Opportunities* dan *Threats* (Rangkuti, 2004). Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT merupakan instrumen perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.

Alur Pemikiran Penelitian

Kelautan Indonesia kedepan diharapkan dapat menjadi arus utama *mainstream* pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*) untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Keinginan tersebut dijabarkan dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) Membangun jaringan sarana dan prasarana, (2) Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan (3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu, dan (5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).



Gambar 1. Alur Pemikiran Penelitian

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, maka alur pemikiran dalam studi ini dimulai dengan menganalisa kondisi internal dan eksternal. Hasil analisa internal menghasilkan *strength dan weakness* sedangkan analisis eksternal akan menghasilkan *opportunity dan threats*. Kemudian, hasil analisa SWOT akan mendapatkan gambaran mengenai strategi pembangunan kemaritiman. Kerangka pemikiran studi ini disajikan pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Ekonomi Kelautan

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang wilayah lautnya termasuk ZEEI (5,8 juta km²) meliputi 75 persen total wilayahnya, terdiri dari 17.504 pulau (baru 13.466 yang telah diberi nama dan didaftarkan ke PBB), dan dikelilingi 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), pencapaian hasil pembangunan KP tersebut masih jauh dari potensi kelautan yang Indonesia miliki alias jauh dari optimal (Dahuri, 2014).

Seperti diketahui, bahwa wilayah laut Negara Indonesia yang luasnya sekitar 70% dari luas wilayah Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Seperti halnya (a) potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dari jumlah tangkap yang diperbolehkan 7.94 juta ton/tahun, dan masih adanya kapal perikanan asing secara *illegal* masuk ke perairan Indonesia; (b) potensi sumberdaya pertambangan di laut besar namun belum memiliki cukup landasan regulasi dalam pemanfaatannya, (c) potensi *biodiversity* untuk pemanfaatan keekonomian *bioprospect* dan wisata bahari) yang belum optimal, (d) potensi laut sebagai media transportasi belum juga dimanfaatkan secara optimal untuk konektivitas, (e) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih miskin belum banyak tersentuh dalam pelayanan dasar dan kebutuhan dasar serta kesempatan ekonomi (Kusumastanto, 2013).

Kontribusi perekonomian berbasis maritim dalam perekonomian nasional mengalami pertumbuhan namun dalam persentasi dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam dasa warsa terakhir mencapai antara 4.63%-6.49%. Dengan PDB yang telah mencapai lebih dari Rp 8.241 trilyun Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian dunia, namun demikian peran perekonomian berbasis maritim hanya mencapai sekitar 22.42% (Kusumastanto, 2013). Peran ekonomi kelautan dalam struktur perekonomian Indonesia kurang berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Aktivitas ekonomi kelautan tersebut belum berkembang dengan baik disebabkan oleh faktor-faktor kebijakan nasional yang tidak berpihak kepada pengembangan bidang ekonomi kelautan sehingga menyebabkan struktur ekonomi Indonesia bias aktivitas berbasis daratan. Diantara indikator yang menunjukkan aktivitas ekonomi kelautan kurang berkembang diantaranya adalah rendahnya investasi yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi berbasis maritim/kelautan. Kontribusi bidang kelautan dalam struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor pertambangan

dan energi sebesar 9.13%, selanjutnya secara berturut-turut industri maritim 4.67%, perikanan 2.79%, pariwisata bahari 1.52%, transportasi laut 1.48%, jasa kelautan 1.32% dan bangunan kelautan 1.01%.

Peluang dan Ancaman Sektor Maritim Di Indonesia

Pemetaan peluang dan ancaman sektor maritim di Indonesia terdiri dari, bahwa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dalam negeri dapat dilihat dari potensi kelautan yang ada di wilayah Indonesia. Wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa sumberdaya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut dan produk-produk bioteknologi); sumberdaya alam tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan *Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)*) maupun jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.

Demikian halnya, terkait dengan ancaman sektor maritim berasal dari internal dan eksternal, dimana internal adanya terjadi ketimpangan terutama di bagian Indonesia timur yang mengalami pertumbuhan sangat lambat, pembangunan infrastruktur terhambat, potret kemiskinan dan permasalahan lainnya. Adapun ancaman berasal dari eksternal luar diantaranya sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Filipina, antara Indonesia dengan Singapura, dan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, kurangnya penegakan hukum dan pengawasan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.

Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Kemaritiman

Negara Indonesia yang terdiri dari 70% wilayah teritorialnya adalah laut. Namun struktur perekonomian saat ini, belum menggambarkan potensi dan kekuatan potensi maritim sebagai sumberdaya alam yang dimiliki. Selain itu, pemerintah Indonesia selama ini masih belum memberikan perhatian dan keberpihakan pada bidang maritim sebagai jati diri bangsa selama berabad-abad memiliki peran budaya dan sejarah yang membentuk Indonesia sebagai Nusantara. Laut sudah terbukti merupakan bagian tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia namun belum diberikan peran yang semestinya. Dengan demikian visi bahwa Indonesia adalah negara maritim belum tercapai karena Indonesia belum mampu menguasai, mengelola dan memperoleh kesejahteraannya dari sumberdaya kelautan dan fungsi laut (Kusumastanto, 2013). Keadaan tersebut terlihat dari nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Koefisien ICOR Bidang Kelautan

No.	Bidang Kelautan	Nilai Indeks ICOR
1.	Perikanan	3.31
2.	Pertambangan	3.71

3.	Industri Maritim (pengilangan minyak Bumi, LNG dan industri maritim lainnya)	3.39
4.	Angkutan Laut	3.67
5.	Pariwisata Bahari	3.02
6.	Bangunan Kelautan	4.02
7.	Jasa Kelautan Lainnya.	3.34

Sumber : Kusumastanto, 2013

Menurut Kusumastanto, 2013 menjelaskan apabila dikomparasi dengan perhitungan tabel Input-Output 2005 maka untuk kategori 172 sektor maka nilai koefisien ICOR dari kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan maritim relatif kurang efisien sehingga perlu dikembangkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada bidang kelautan. Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai ICOR terendah terjadi pada bidang pariwisata bahari dengan nilai indeks ICOR sebesar 3.02. Artinya bidang pariwisata bahari merupakan bidang yang paling efisien dan mempunyai risiko paling kecil untuk penanaman investasi jika dibandingkan dengan bidang lain. Apabila dilihat dari kontribusi terhadap PDB nasional maka sektor pariwisata bahari memberikan kontribusi peningkatan yang cukup signifikan. Bila dilihat dari nilai ICOR yang sebesar 3.02 maka bidang ini sangat mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut dikarenakan dengan pertumbuhan bidang ini sebesar kurang lebih 15% maka kebutuhan tingkat investasi yang diperlukan sekitar 5% dari PDB. Adapun untuk sektor minyak, gas dan mineral mempunyai nilai Indeks ICOR lebih besar 3.7, yang berarti mempunyai tingkat risiko yang lebih besar dalam hal penanaman investasi.

Selanjutnya, Kusumastanto (2013) menjelaskan bahwa bidang bangunan kelautan mempunyai nilai indeks ICOR yang paling besar Apabila dibandingkan dengan bidang lainnya yaitu 4.02. Senada dengan Bank Dunia (2014) bahwa dengan nilai rata-rata ICOR Indonesia sebesar 3.6 maka angka yang diperoleh dari bidang bangunan kelautan yang jauh lebih besar. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam memprioritaskan kebijakan investasi bidang bangunan kelautan termasuk didalamnya pelabuhan masih kurang efisien. Namun demikian, karakteristik negara kepulauan seharusnya tetap memberikan dukungan mengingat dampak yang besar bagi perekonomian khususnya bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil dan nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Sementara sektor perikanan laut dan payau yang mempunyai nilai indeks ICOR 3.31 yang berarti memiliki efisiensi yang cukup baik sehingga peluang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan mengingat sektor perikanan sangat penting dalam membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan berpenghasilan menengah ke bawah.

Keragaan dan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kelautan

Keragaan ekonomi makro berdasarkan data Pendapatan Domestik Bruto menurut harga konstan tahun 2000 terlihat bahwa pada periode 2005-2013 lapangan usaha-lapangan usaha dibidang kelautan yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi adalah (1) perikanan (2) angkutan laut (3) angkutan sungai danau dan penyeberangan, serta (4) pengilangan minyak bumi. Sementara itu untuk lapangan usaha pertambangan minyak

dan gas bumi serta pengolahan gas alam cair (LNG) memiliki pertumbuhan yang negatif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perikanan dalam periode 2005-2013 berkisar antara 5.07%-6.96%. Pertumbuhan ekonomi angkutan laut berkisar antara -5.05% -8.75% dan pertumbuhan ekonomi angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam periode yang sama berkisar antara 3.94%-6.97%. Sementara itu berdasarkan data Nota Keuangan dan APBN 2014 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2004-2008 rata-rata tumbuh sebesar 5.9 persen pertahun. Dengan demikian, terlihat bahwa sektor perikanan dan angkutan penyeberangan memiliki pertumbuhan diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Kelautan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Termasuk dalam Sektor Kemaritiman Tahun 2014-2017 (Rp Milyar)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
Perikanan	245,488	288,917	317,092	259,489
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	509,783	384,516	369,354	288,366
Pengilangan Minyak Bumi	176,258	192,940	219,595	163,262
Gas Alam Cair (LNG)	114,905	131,250	142,772	120,332
Angkutan Laut	36,075	39,307	39,907	30,799
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	13,137	14,267	14,185	11,171
PDB Nasional	1,095,646	1,051,197	1,102,905	873,419

^{*)} Quartal 3, 2017

Sumber : Bank Indonesia, 2017: laman http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL7_1.pdf

Apabila dilihat berdasarkan PDB berdasarkan harga berlaku terlihat bahwa dalam periode 2014-2017 rata-rata PDB perikanan rata-rata mencapai Rp. 277,747 milyar per tahun. Berikutnya untuk PDB pertambangan minyak dan gas rata-rata mencapai Rp. 388,005 milyar per tahun. PDB pengilangan minyak bumi rata-rata mencapai Rp. 188,014 milyar per tahun. PDB Gas Alam Cair (LNG) rata-rata mencapai Rp. 127,315 milyar per tahun. PDB angkutan laut rata-rata mencapai Rp. 36,522 milyar per tahun. dan PDB angkutan sungai, danau dan penyebrangan rata-rata mencapai Rp. 13,190 milyar per tahun. Secara lengkap perkembangan PDB kelautan menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 juga dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi perikanan terhadap total PDB nasional baru mencapai 2.35%. Besaran nilai tersebut, berasal dari kontribusi sektor perikanan sendir mencapai 0.63%, sektor pertambangan minyak dan gas bumi mencapai 0.87%, sector pengilangan minyak bumi mencapai 0.42%, sektor Gas Alam Cair (LNG) mencapai 0.29%, sektor angkutan laut mencapai 0.09% dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan mencapai 0.03%. Analisis pertumbuhan ekonomi dari PDB di sektor perikanan dan kelautan menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang kelautan kurang dapat tumbuh secara optimal dikarenakan pemanfaatannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana hanya sektor

perikanan dan angkutan laut yang tumbuh relatif tinggi melebihi nilai rata-rata sementara sektor lainnya kurang tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen negara pada bidang kelautan dan perikanan belum dilakukan dengan baik secara ekonomi maupun pengembangan sumberdaya manusia.

Berdasarkan data tersebut di atas, terkait dengan pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan investasi dan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik melakukan investasi pada bidang ekonomi yang berbasis maritim. Perspektif pembangunan harus diubah dengan memadukan aktivitas ekonomi berbasis laut dan darat yang menjadi sebuah kesatuan ekonomi nusantara. Kebijakan-kebijakan tersebut harus diikuti dengan langkah konkrit untuk membenahi aspek hukum melalui perbaikan hukum dan perundangan di bidang maritim. Adanya keberpihakan pada ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi kerakyatan menjadi urgen dalam membangun perekonomian. Pembangunan struktur ekonomi Indonesia selalin didorong untuk memberikan dukungan pada pengembangan potensi maritim yang relatif tertinggal juga diarahkan untuk memberikan kemampuan kepada lembaga negara melalui *ocean governance* yang bersih dan berwibawa serta keterpaduannya dengan sektor swasta dimana mampu mendorong iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Strategi Kebijakan Pembangunan Kemaritiman dalam Kerangka Peningkatan Investasi Nasional

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa terkait dengan peluang dan ancaman dimana dinamika strategis kebijakan kemaritiman berdasarkan pada konstruksi dan perwujudan negara maritim Indonesia tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, namun juga dalam bidang pertahanan dan keamanan, lingkungan, ilmu dan pengetahuan, inovasi dan teknologi, serta sosial budaya dan kelembagaan. Pada intinya dimensi ekonomi mencakup empat kelompok kebijakan dan program pembangunan. Adapun strategi kebijakan pembangunan kemaritiman adalah:

1. Revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan yang selama ini sudah berjalan (*existing marine economic sectors*). Perlunya penguatan kebijakan tersebut dilakukan seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan dan energi (ESDM), pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri dan jasa maritim. Revitalisasi yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, keadilan (*inclusiveness*), dan keberlanjutan (*sustainability*) dari sektor-sektor ekonomi kelautan tersebut.
2. Pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan yang baru. Perlunya kebijakan strategis seperti industri bioteknologi kelautan, industri air laut dalam (*deep sea water industry*), budidaya perikanan di perairan laut dalam atau laut lepas (*offshore aquaculture*) seperti yang dilakukan di Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, adanya produksi energi terbarukan dari laut (pasang surut, gelombang, *biofuel* dari algae laut dan *OTEC/Ocean Thermal Energy Conversion*) dan sumber daya kelautan non-konvensional lainnya. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi dan ramah lingkungan.

3. Perlunya kebijakan pengembangan pusat-pusat (*clusters*) pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri yang inovatif dan ramah lingkungan ini perlunya di kawasan-kawasan pesisir di sepanjang ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai bangsa produsen dan pemasok barang dan produk dalam sistem rantai suplai global (*the Global Supply Chain System*).
4. Penguatan dan pengembangan tol laut. Strategi kebijakan ini diperlukan dalam upaya penguatan dan pengembangan konektivitas kelautan yang biasa disebut tol laut yang mencakup pengembangan armada kapal penumpang dan barang, pelabuhan, industri galangan dan reparasi kapal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat ditarik dari hasil kajian ini adalah: (1) potensi sektor maritime Indonesia sangat besar namun masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, (2) pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor maritime dan masih lemah dalam konsistensi dan prioritas implementasinya program-program tersebut, (3) sebagai suatu negara dengan kekuatan ekonomi yang terus berkembang maka keberlanjutan kemajuan Indonesia akan semakin bergantung pada perdagangan dan angkutan laut dan ketersediaan energi, (4) pada eksploitasi sumber daya laut dan bawah laut serta membangun industri maritim yang tangguh menjadi prioritas dalam pengembangan investasi wilayah, (5) pembangunan kemaritiman dengan mengedepankan isu-isu strategis atau dinamika lingkungan strategis mutlak diperlukan sehingga konsep pembangunan kemaritiman Indonesia akan bermanfaat baik untuk lingkup nasional (kepentingan bangsa), regional bahkan internasional, dan (6) pembangunan kemaritiman memang cukup luas karena terdiri dari berbagai sektor mulai dari sumber daya kelautan, keamanan, hingga pariwisata. Untuk itu pembangunan ekonomi laut di desa pesisir ini harus dilakukan oleh semua pihak.

Berdasarkan simpulan diperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan adalah bahwa dalam membangun maritim Indonesia dalam kerangka peningkatan investasi nasional, maka pemerintah perlu melakukan; (1) pembangunan yang berorientasi kemaritiman, (2) pembangunan konektivitas melalui penguatan logistik dan ekonomi kelautan, (3) pembangunan ekonomi (*prosperity approach/belt*) dan hankam kelautan (*security approach/belt*), (4) penguasaan terkait dengan otorisasi bangsa dan kemaritiman, (5) implementasi berbagai strategi kebijakan secara bertahap dan konsisten, (6) menyusun roadmap pembangunan kemaritiman untuk memudahkan monitoring dan evaluasi, dan (7) reorientasi pembangunan menuju pembangunan kemaritiman dengan pencapaian penanaman modal yang lebih progresif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan pertama kali penulis sampaikan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian yang sudah memberikan kesempatan kepada kami menjadi tim peneliti atau pengkaji dalam kajian ini. Selain dukungan dana, juga dukungan data dan informasi hingga kajian ini selesai sesuai dengan yang diharapkan. Tidak lupa, kepada para peneliti Rokhmin Dahuri Institut yang sudah memberikan kesempatan juga kepada penulis serta dukungan yang sangat baik, terkait dengan akses data maupun informasi berharga utamanya dalam penguatan mengenai aspek kemaritiman dan kelautan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2017. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku. Diakses pada laman: http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL7_1.pdf, tanggal 5 Desember 2017
- Dahuri, R.. 2013. Momentum Mengembalikan Kejayaan Negara Maritim. Diakses pada laman <https://nasional.sindonews.com/read/816499/18/momentum-mengembalikan-kejayaan-negara-maritim-1386894376>, tanggal 30 November 2017.
- Dahuri, R. 2014. Membangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju, Adil, Makmur, Kuat dan Mandiri. Diakses pada laman <https://www.kompasiana.com/rokhmin/membangun-indonesia-sebagai-negara-maritim-yang-maju-adil-makmur-kuat-dan-berdaulat> 54f9781ba33311d0668b46b5 pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Dahuri, R. 2016. Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Indonesia. Penerbit Roda Bahari, Bogor.
- Rangkuti, F. 2004. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru. Jakarta.
- Kusumastanto, T. 2013. Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan Negara Maritim. Diakses pada laman <https://www.scribd.com/document/349628571/Strategi-Pembangunan-Negara-Maritim-Prof-Tridoyo-Kusumastanto-doc>, pada tanggal 7 Desember 2017.